

Penanggung Jawab:

José Luís de Oliveira

Redaksi: A. Castro, Nuno Hanjan, A. Neves, N. Katjasungkana, Sebastião da Silva, Octavia do Carmo, Rui Viana, F.X. Sumaryono, E. Saldanha, Nina Marques, Danino da Cunha, Julino Ximenes, TI, Rogério Soares, José C. Marçal. **Distribusi:** Martinho Viana

Cidadaun

Hamutuk Hari'i Nasaun Demokratiko

Penerbit:**Yayasan HAK**

Jl. Gov. Serpa Rosa T-091, Farol, Dili

Tel. + 670 390 313323

Fax. + 670 390 313324

e-mail: direito@yayasanhak.minihub.org

Dengan dukungan:



No. 10, Minggu II, Oktober 2001

F.X. SUMARYONO

• ISI NOMOR INI •



Opini Uskup Mgr. Belo

Hal. 2



Berita Pemantauan

Hal. 3



Konstitusi

Hal. 6

OPINI

Biarlah Mereka Kerja Dulu Hal. 2

BERITA PEMANTAUAN

Sulitnya Menjadi Utusan Distrik Hal. 3

Satu Fraksi Beda Pendapat Hal. 3

Gaji Wakil Rakyat Hal. 4

Komisi-Komisi Majelis Hal. 4

TATOLI

Konsensus atau Voting? Hal. 5

KONSTITUSI

Tiga Sistem Pemerintahan Hal. 5

Pendapat Rakyat Hal. 6

ADVOKASI

Tugas Ganda Majelis Hal. 7

LIAFUAN

Mari Menyumbang Buku Hal. 8

PROFIL

Januario Soares & Vicente Guterres Hal. 8



Pro-Kontra Komisi Khusus Legislatif

• • •

Majelis Konstituante akhirnya menyetujui pembentukan Komisi Khusus Legislatif. Tugas komisi ini adalah menjalankan fungsi legislatif seperti yang ditetapkan oleh Regulasi UNTAET No. 2/2001, yaitu membahas dan mengesahkan rancangan regulasi yang diajukan oleh Administrator Transisi. Sebelum mengambil keputusan mengenai ketentuan yang dimasukkan dalam pasal 26 Rancangan Tata-Tertib Majelis Konstituante, terjadi debat yang panas. Sidang yang berlangsung hari Kamis (4/10) mengambil keputusan melalui pemungutan suara (*voting*) yang dimenangkan pendukung ketentuan ini. Pendukung ketentuan ini umumnya dari FRETILIN, sementara PSD dan PD menentang. Perbedaan sikap ini sepertinya merupakan kristalisasi pengkubuan di dalam Majelis.

Kepada media massa, Sekjen PD Mariano Sabino Lopes mengatakan bahwa fraksinya menentang keputusan itu karena menganggap wewenang untuk mengesahkan sebuah peraturan harus berada di tangan sidang lengkap (pleno) Majelis Konstituante. "Komisi Khusus Legislatif itu harus ditempatkan sebagai komisi teknis yang hanya bertugas menganalisis, menilai, dan menggodok setiap regulasi yang diusulkan Pemerintah Transisi, sementara keputusan pengesahannya ada pada pleno Majelis Konstituante," ujar Mariano. Sementara Wakil Presiden PSD Leandro Isac sambil menunjuk pada Regulasi UNTAET No. 2/2001 menyatakan bahwa wewenang Majelis Konstituante untuk mengambil keputusan legislatif terletak pada semua anggota Majelis, bukan pada komisi yang dibentuknya.

UDC/PDC juga sejalan dengan PD dan PSD. Vicente Guterres, satu-satunya wakil rakyat dari UDC/PDC mengatakan, tidak ada alasan apa pun yang logis dan rasional yang dapat membenarkan Majelis Konstituante mendelegasikan banyak wewenangnya kepada sebuah komisi atas nama Majelis. "Saya sangat menyesalkan

usulan sebagian fraksi yang baik itu terpaksa dikalahkan ketika dilakukan *voting*," kata Guterres. Sejak awal Guterres memang termasuk yang menolak pemberian wewenang mutlak kepada Komisi Khusus Legislatif. Pada kesempatan lain, *deputado* Clementino Amaral (KOTA) dengan nada menyindir mengatakan bahwa keputusan seperti itu adalah luar biasa, karena sebuah komisi justru diberi wewenang politik melebihi wewenang Majelis yang menjadi induk komisi itu.

Beberapa anggota Majelis Konstituante dari FRETILIN yang ditanya tentang pilihan mereka yang ditentang fraksi lain itu mengatakan bahwa pemberian wewenang pengesahan atas rancangan regulasi yang diajukan UNTAET kepada Komisi Khusus Legislatif adalah semata-mata untuk kepentingan efektivitas kerja Majelis Konstituante. Daripada semua anggota Majelis harus kehilangan konsentrasinya pada soal-soal lain di luar konstitusi, lebih baik biarkan tugas di luar itu dilakukan saja oleh komisi khusus. Begitulah argumentasinya.

Sebuah alasan yang logis, jika pandangan kita diarahkan pada kenyataan bahwa UNTAET sudah menyodorkan lebih dari 20 rancangan regulasi kepada Majelis Konstituante. Sebuah pekerjaan yang tentunya akan banyak menyita waktu, pikiran, dan tenaga. Bayangkan, jika pembahasan rancangan-rancangan itu dilakukan oleh semua anggota Majelis Konstituante. Pekerjaan utama mereka menyusun konstitusi akan terbengkalai. Alasan yang masuk akal. Tetapi bagaimana jika rancangan regulasi yang diajukan UNTAET ternyata menyangkut seluruh aspek kehidupan bangsa, tetapi rancangan tersebut dibahas dan kemudian diputuskan hanya oleh Komisi Khusus Legislatif, bukan oleh seluruh anggota Majelis Konstituante? Yang dipilih rakyat adalah semua anggota Majelis, karena itu wakil rakyat adalah seluruh anggota Majelis. Jika kita berpegang pada demokrasi, wewenang memutuskan harus tetap di tangan mereka. •

Rui Viana

PEMBERITAHUAN

Listrik di kota Dili semakin sering padam. Akibatnya kami kesulitan menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal. Oleh karena itu mingguan *Cidadaun* menjadi sering terlambat Anda terima. Kepada para pembaca, kami meminta maaf.

Demikian pemberitahuan kami. Harap maklum.

Salam kami,
Redaksi

Komisi Khusus Legislatif

Menurut Peraturan UNTAET No. 2/2001 tentang Pemilu Majelis Konstituante, tugas Majelis Konstituante selain menyusun konstitusi negara merdeka Timor Lorosae, adalah membahas dan mengesahkan rancangan regulasi yang disampaikan padanya oleh Administrator Transisi (pasal 2.5). Dengan tugas ini, berarti Majelis Konstituante memiliki kekuasaan legislatif (kekuasaan untuk membuat undang-undang) seperti yang dimiliki oleh sebuah parlemen. Sebelum adanya Majelis Konstituante, tugas semacam ini dulu dijalankan oleh National Consultative Council (NCC, Dewan Konsultasi Nasional) dan kemudian National Council (NC, Dewan Nasional) yang keduanya diangkat oleh Administrator Transisi Sergio de Mello.

Pada saat Peraturan No. 2/2001 pada bulan Februari 2001, banyak pihak tidak memperhatikan pasal 2.5 tersebut. Perhatian para pemimpin politik lebih diarahkan pada bagaimana membuat persiapan untuk mengikuti pemilu agar bisa duduk di Majelis Konstituante, seperti membentuk kepengurusan partai politik, menyusun daftar kandidat, membuat strategi kampanye, dan sebagainya. Sangat jarang, jika ada, yang menyoroti bahwa Majelis Konstituante nantinya bebannya akan terlalu banyak, karena harus membuat konstitusi dan membahas rancangan-rancangan regulasi. Padahal saat itu sudah ada sejumlah rancangan regulasi yang oleh NC dilimpahkan pembahasannya kepada Majelis Konstituante yang akan dibentuk, baik karena waktu pembahasannya yang tidak cukup maupun karena sangat pentingnya isi regulasi tersebut sehingga harus dibahas dan disahkan oleh badan yang dipilih rakyat.

Kehebohan baru muncul ketika Majelis Konstituante membahas rancangan ketentuan tata-tertibnya. Dengan alasan agar Majelis Konstituante bisa berkonsentrasi pada penyusunan konstitusi, beberapa fraksi mengusulkan agar dibentuk Komisi Khusus Legislatif yang bertugas membahas dan mengesahkan rancangan regulasi. Komisi ini beranggotakan 35 orang anggota Majelis Konstituante yang tidak menduduki jabatan pada Kabinet Transisi Kedua. Dengan ketentuan ini, tidak akan ada anggota Majelis yang merangkap sebagai anggota kabinet yang duduk di Komisi Khusus Legislatif, dan dengan demikian, menurut para *deputados* yang mengusulkannya, tidak terjadi perangkap fungsi eksekutif dan legislatif. Usulan ini ditentang oleh *deputatos* dari PD, PSD, dan UDC dengan alasan bahwa wewenang legislatif ada pada Majelis Konstituante, dan karena itu keputusan mengenai regulasi harus diambil dalam sidang lengkap (pleno) Majelis.

Seperti penetapan masa kerja Majelis Konstituante 90 hari, pemberian tugas ganda menyusun konstitusi dan mempertimbangkan/mengesahkan regulasi adalah bagian dari perencanaan transisi yang dibuat UNTAET. Jika kita perhatikan, perencanaan transisi ini sangat tidak baik. Sebagai badan yang bertanggungjawab mendirikan negara merdeka Timor Lorosae, seharusnya UNTAET sejak awal menyampaikan agenda transisinya. Tetapi agenda ini baru dibuat sebagai reaksi terhadap agenda politik transisi yang disampaikan CNRT mendekati akhir tahun lalu. Ketentuan hukum yang mengaturnya cuma Peraturan 2/2001, yang *sekaligus* mengatur tentang partai politik, penyelenggaraan pemilu, dan Majelis Konstituante itu sendiri. UNTAET memang tidak merencanakan dengan baik transisi kemerdekaan Timor Lorosae, tetapi kita semua harus berusaha keras agar transisi berlangsung sedemokratis mungkin. Cidadaun

• Pffu i i i i ! •

"Usulan ini dari partai UDT, bukan dari saya. Kalau ada pertanyaan, kalau bisa akan saya jawab. Kalau saya tidak bisa, tolong tanya ke partai. Karena ini bukan saya yang membuat," kata Isabel da Costa Ferreira ketika menyampaikan usulan UDT kepada Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi.

Lho, Isabel da Costa Ferreira itu dari partai mana?

"Kalau berbicara bahasa Indonesia yang jelas, kalau bahasa Tetum juga jangan campur-campur!" kata *deputado* Aderito de Jesus Soares (FRETILIN). *Deputado* Mario Sabino Lopes (PD) menimpali, "Ya! kepada para orang tua, kalau berbahasa Tetum jangan campur-campur dengan Portugis ..."

Maklum, Timor Lorosae dulu dikuasai oleh para penguasa asing yang rajin memaksakan bahasanya.



Wawancara dengan Uskup Belo

"Biarlah Mereka Kerja Dulu"

Pada 28 September lalu, José Luís de Oliveira, Nug Kacasungkana, dan F.X. Sumaryono dari *Cidadaun* mewawancarai Uskup Dili Dom Carlos Filipe Ximenes Belo. Berikut ini petikannya.

Bagaimana pendapat Bapak Uskup tentang rekonsiliasi?

Banyak orang berbicara tentang rekonsiliasi, tetapi belum ada keadilan yang merata dan lengkap. Sekarang sedang dibentuk komisi yang dalam bahasa Portugis disebut *Comissão de Acolhimento, Verdade e Reconciliação* [Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi], seperti di Afrika Selatan. Ini merupakan langkah maju dan terbaik. Harapan saya semoga dari seluruh partai dan semua kalangan ada cukup kerendahan hati untuk menghadapi komisi itu.

Sebagian pemimpin politik mengusulkan amnesti umum. Rakyat umumnya menginginkan hal yang berbeda.

Mereka harus mendengarkan rakyat! Karena suara yang muncul dari bawah dengan keras lebih banyak menuntut keadilan. Dan mereka tidak mengerti apa itu amnesti dan apa tujuannya. Mereka tidak mengerti. Kalau ada amnesti, siapa yang akan memberikan? Kalau diberikan nanti, akan ada yang main hakim sendiri, dan itu akan melawan amnesti. Maka amnesti tidak akan jalan. Jadi keadilan dan kebenaran harus ditegakkan. Kalau yang salah, ya salah. Kalau tidak salah, ya tidak salah.

Jadi rekonsiliasi dan keadilan harus sejalan?

Bagi saya, rekonsiliasi dan keadilan itu seperti satu mata uang dengan dua sisi. Rekonsiliasi dengan keadilan, keadilan dengan rekonsiliasi. Keadilan sendiri tanpa rekonsiliasi tidak lengkap. Ini tidak manusiawi. Begitu pula, rekonsiliasi tanpa keadilan tidak akan menyelesaikan masalah.

Apakah ini berhubungan dengan pengembangan demokrasi di Timor Lorosae

Tentu saja. Demokrasi menuntut menerima semua orang, menghargai semua orang. Tetapi demokrasi juga menuntut hukum. Sekarang ini satu ada ide yang tidak benar, bahwa kita sekarang kita berada dalam era demokrasi, hak saya berbuat apa saja sesuai kemauan saya. Itu bukan demokrasi! Dalam bahasa Portugis itu "libertinagem", kurang ajar!

Sepertinya demokrasi saat ini lebih menjurus pada saling menyerang dan saling bersaing?

Itu baik ... oke itu suatu proses yang baru muncul, biarlah [para pemimpin politik] bertengkar, tetapi selalu dengan spirit bahwa kita orang Timor, kita orang beragama. Harus juga berpikir, walau bertengkar tetapi harus menghargai orang lain, pendapat orang lain. Tetapi yang terutama, semua harus duduk bersama-sama mencari jalan yang terbaik, menuju satu konsensus yang bisa menyelesaikan segalanya dengan baik. Ini harus dimulai dari lingkungan keluarga, sesuai dengan adat kita, orang Timor. Bertengkar itu selalu ada, kalau kita terjun ke dunia po-

litik, harus bertengkar. Tetapi harus membedakan bertengkar untuk siapa, apakah bertengkar untuk rakyat, atau untuk mereka yang duduk di atas. Kalau mereka mendingar aspirasi dari bawah, saya yakin mereka tidak akan bertengkar. Orang-orang yang bertengkar itu, mungkin tidak jalan ke pedalaman di desa-desa. Mungkin mereka hanya di dalam kota, di Dili saja, atau di kota kabupaten saja, dan kadang-kadang aspirasi hanya didapat dari lingkungannya saja. Padahal Timor Lorosae masih luas.

Apakah pertengkaran tersebut masih dalam rangka proses demokrasi?

Ya, itu masih bagian demokrasi. Saya harapkan bertengkar mulut, tetapi jangan sampai bertengkar fisik. Saat ini biarlah dijadikan suatu proses belajar demokrasi. Saya hanya minta saling menghargai. Seandainya mereka bertengkar, mereka harus berani untuk minta maaf... Ya, mengapa sampai sekarang Komisi Kebenaran, Rekonsiliasi dan Penerimaan belum berjalan? Karena orang-orang tidak berani untuk minta maaf atas kesalahan yang pernah diperbuat. Yang utama bagi kita semua saat ini, harus rendah hati, untuk saling meminta maaf.

Bagaimana Bapak Uskup melihat Majelis Konstituante, khususnya yang berhubungan dengan, keluh-kelehan yang disampaikan masyarakat saat ini?

Tentang Majelis Konstituante itu, pendapat saya: biarlah mereka kerja dulu, berikan kesempatan kepada mereka. Sebaiknya kita menunggu hasil kerja mereka.

Apakah sebaiknya masyarakat membantu, dengan memberi usulan-usulan?

Saya juga tidak sependapat, mungkin juga melawan Yayasan HAK dan beberapa LSM dalam hal ini. Karena [Majelis Konstituante] perlu orang-orang yang ahli atau tahu tentang segala-galanya seperti budaya, sejarah, hukum. Kalau kita semua, baik UNTAET maupun NGO diberi kesempatan untuk berbicara, saya rasa akan menimbulkan *confusion* [kebingungan]. Biarlah ada satu tim khusus untuk menyiapkan konstitusi yang baik, yang nantinya bisa menjadi bahan referendum, untuk mendapat keabsahan dari rakyat. Saya juga bisa ikut bicara, tetapi saya tidak mau. Biarlah mereka yang menyiapkan. Tuntutan bahwa harus ada konsultasi serta menerima usulan, bagi saya itu tidak begitu penting. Yang lebih penting, harus ada sebuah tim kecil, yang di dalamnya duduk orang-orang yang ahli, agar menyiapkan hal tersebut untuk kemudian disampaikan ke masyarakat umum, agar bisa dinilai oleh masyarakat, apakah cocok atau tidak.

Majelis Konstituante menyusun rancangan konstitusi dengan bantuan para ahli, setelah itu dibuat referendum?

Ya, itu pendapat saya, bahwa konstitusi itu harus mendapat keabsahan dari seluruh rakyat. Rakyat yang menentukan setuju atau tidak setuju. Saya kira begitu. ●

Sulitnya Menjadi Utusan Distrik

Para anggota Majelis Konsituante yang mewakili distrik kesulitan transportasi dan tempat tinggal. Bagaimana tanggungjawab UNTAET?

• • •

Pada pemilu lalu rakyat Timor Lorosae telah menentukan pilihannya untuk mengutus para wakil distrik dan wakil nasional untuk menulis konstitusi. Semuanya berjalan dengan semangat *ukum rasik aan*. Namun, dalam perjalanannya mereka tidak lepas dari masalah. Kesulitan tempat tinggal dan transportasi adalah sebagian yang dihadapi sejumlah anggota, terutama utusan distrik. Ada yang harus menumpang di rumah keluarga. Ada pula yang hampir setiap hari harus berjalan kaki ke gedung Majelis Konstituante.

"Di sini [Dili, *Red.*] saya menumpang pada keluarga," kata Januario Soares, wakil distrik Viqueque. "Dalam perjuangan kita mengenal satu istilah, yaitu pengobanan. Biarkan kita memberikan pengorbanan untuk membangun rakyat dan negara kita," lanjutnya. Menurutnya, kesulitan yang mereka hadapi adalah kesulitan semua orang. "Kesulitan yang kami alami sekarang adalah

masalah transportasi. Itu yang membuat saya kadang-kadang terlambat mengikuti sidang. Kadang-kadang saya minta tolong teman untuk mengantarkan ke Gedung Majelis. Tetapi, saya sering harus berjalan kaki," katanya. Anak dan istrinya tetap tinggal di rumah mereka di Viqueque. Januario Soares belum berpikir untuk mencari uang untuk membiayai mereka tinggal di Dili.

Keluhan yang senada datang dari Jeronimo da Silva, seorang wakil nasional dari FRETILIN. "Kami sangat kesulitan dalam hal transportasi dan saat ini UNTAET belum memperhatikan hal ini," katanya kepada *Cidadaun*. Karena itu, menurutnya, banyak anggota Majelis Konstituante yang setiap hari naik taksi. Untuk itu mereka secara pasti setiap hari mengeluarkan biaya sebesar Rp 40.000.

Adanya kesulitan seperti itu tidak dipandang sebagai halangan untuk menjalankan tugasnya. Baginya, ini



Sebagian utusan distrik di Majelis Konstituante.

• • •

merupakan konsekuensi dari pilihan yang diberikan rakyat pada mereka untuk menjadi wakil rakyat. "Kami harus menjalaninya, karena merupakan tanggungjawab kami kepada rakyat. Kami harus berusaha. Bukan berarti dengan kesulitan ini kami harus meninggalkan tanggungjawab kami," tegasnya.

Sementara Alfredo da Silva, wakil rakyat Distrik Aileu juga beranggapan bahwa kesulitan tempat tinggal maupun transportasi tidak boleh menjadi hambatan. Kesulitan yang dihadapi oleh utusan distrik maupun utusan nasional yang berasal dari luar kota Dili itu ti-

dak terlepas dari kesulitan yang dihadapi oleh seluruh rakyat Timor Lorosae.

Tentang kesulitan transportasi yang dialaminya, ia mengatakan bahwa dirinya sering mendapat bantuan dari anggota masyarakat. "Ada kalanya masyarakat memberi bantuan kepada saya," katanya. Dalam hal ini, orang yang mempunyai alat transportasi mengantarkannya ke Gedung Majelis Konstituante. "Jadi tidak terlalu menjadi masalah," katanya mantap.

Betul, wakil rakyat harus tetap bersemangat *ukum rasik aan*. •

Rogério Soares

Beda Pendapat Dalam Satu Fraksi

Dalam sidang Majelis Konstituante terjadi perbedaan pendapat antar anggota dalam satu fraksi. Gejala demokrasi atau ketidaksiapan partai politik?

• • •

Dalam sidang majelis beberapa waktu lalu terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara sesama anggota dalam fraksi yang sama. Perbedaan pendapat itu terjadi dalam sidang Majelis yang pada saat itu tengah membahas sebuah pasal tentang fungsi dan wewenang Komisi Khusus Legislatif (KKL).

Perbedaan pendapat saat itu adalah antara anggota fraksi KOTA, Manuel Tilman sebagai Komisi Teknis Pembuat Rancangan Tata Tertib Majelis dan Clementino dos Reis Amaral sebagai ketua fraksi KOTA. Perbedaan pendapat itu memuncak ketika sidang tengah membahas tanggapan, alasan dan argumentasi mengenai kompetensi KKL. Ada sebagian anggota yang tidak setuju mengenai wewenang penuh yang dimiliki oleh Komisi ini. Mereka lebih setuju kalau KKL hanya bertugas untuk mempelajari usulan peraturan, sedangkan yang mengesahkan adalah sidang pleno.

Namun, apa pun argumentasi yang diajukan, Manuel Tilman tetap pada pendiriannya. KKL tetap mempunyai wewenang penuh untuk mengesahkan

setiap peraturan yang diajukan. Alasannya bahwa Majelis punya tugas utama menulis konstitusi, namun dalam Peraturan UNTAET No. 2/2001 pasal 2 (5) berbunyi, "Majelis Konstituante dapat mempertimbangkan rancangan regulasi sebagaimana disampaikan kepadanya oleh Administrator Transisi. Dalam keadaan demikian, pemungutan suara yang menyetujui dari mayoritas anggota Majelis Konstituante telah merupakan persetujuan pada rancangan regulasi tersebut." Karena itu, kata Tilman, kita memutuskan untuk membentuk sebuah komisi dengan kekuasaan penuh untuk mempertimbangkan dan mengesahkan setiap rancangan regulasi yang diajukan.

Mendengar argumentasi tersebut, Clementino dos Reis Amaral tersentak. "Saya tahu, teman fraksi saya, Manuel Tilman adalah seorang sarjana hukum. Tetapi, mungkin sarjana hukumnya tidak benar," kata ketua fraksi KOTA itu. Ia menanggapi sebuah kreasi baru yang diciptakan oleh Majelis yang memberikan kekuasaan penuh kepada KKL untuk mempelajari dan mengesahkan

rancangan regulasi yang kelak akan diajukan oleh pemerintah transisi kedua. Ia semakin terkejut ketika mayoritas anggota Majelis mengangkat tangan untuk menyetujui pembentukan KKL.

Bagi Clementino, mungkin ini baru pertama kali terjadi di dunia. "Saya telah melihat parlemen di dunia yang mempunyai kekuasaan tertinggi untuk mengesahkan sebuah rancangan regulasi adalah sidang pleno yang dihadiri oleh semua anggota majelis. Mungkin uji coba untuk menciptakan konsep dan praksis yang baru," katanya dengan nada kesal.

Perbedaan pendapat juga terjadi di tubuh fraksi UDT, antara Isabel Ferreira sebagai anggota Komisi Teknis Perancang Tata-Tertib dengan João Carrascalão ketua fraksi UDT. Perbedaan itu juga terjadi pada saat pembahasan komposisi keanggotaan KKL. Menurut João Carrascalão, utusan dari partai FRETILIN yang duduk dalam KKL harus seimbang dengan anggota komisi dari partai-partai lain, mengingat FRETILIN sebagai pemenang pemilu yang menjalankan pemerintahan. Di samping itu FRETILIN juga mempunyai mayoritas kursi di KKL. Karena itu akan terjadi kepincangan politik, karena rancangan regulasi yang diajukan oleh eksekutif dari FRETILIN akan selalu disetujui dengan mulus.

Mendengar pernyataan itu, Isabel Ferreira langsung berkomentar. "Kita yang telah terpilih dan duduk di kursi Majelis sebaiknya membuang jauh prasangka buruk dan curiga terhadap sesama, karena kita di sini mewakili rakyat

Timor Lorosae. Semestinya yang kita praktekkan di sini adalah perilaku membuka diri kepada sesama agar dapat terjalin hubungan persatuan dan kesatuan di negeri kita yang baru ini." Mendengar pernyataan Isabel yang ditujukan pada dirinya, João Carrascalão pun menanggapi. "Mungkin Isabel Ferreira baru mengikutinya sekali, tetapi saya telah dua kali. Maksud saya, pemikiran tentang persatuan dan kesatuan. Jadi, tolong saudari Isabel menyadari itu."

Mengenai perbedaan pendapat yang terjadi dalam tubuh kedua fraksi ini, ketua fraksi KOTA Clementino dos Reis Amaral dan ketua fraksi UDT João Carrascalão berpendapat sama. Menurut mereka, perbedaan itu wajar saja dan merupakan dinamika politik yang sesuai dengan asas demokrasi. Meskipun berasal dari fraksi yang sama, mereka saat itu adalah anggota komisi teknis, yang terikat kesepakatan antar anggota komisi. Kesepakatan ini harus mereka pertanggungjawabkan. "Jadi kalau kami berbeda dalam hal ini, menurut kami tidak masalah. Namun yang tidak boleh berbeda adalah dalam hal prinsip politik partai dan program partai yang nantinya diperjuangkan partai kami untuk masuk dalam konstitusi Timor Lorosae," demikian kata Clementino dos Reis Amaral kepada *Cidadaun* ketika ditanya pendapatnya. João Carrascalão dari UDT juga menyatakan hal yang sama.

Boleh saja berbeda pendapat asal punya dasar argumentasi yang kuat. Bukan asal mau berbeda dengan partai lain. •

Augusto Castro

Gaji Anggota Dibayar Setiap Tanggal 15

Wakil rakyat di Majelis Konstituante akan menerima gaji setiap tanggal 15 selama bertugas.

• • •

Selasa (9/10) lalu Dewan Menteri melakukan rapat membahas rancangan regulasi tentang anggaran operasional untuk Majelis Konstituante. Rancangan tersebut menurut rencana akan secepatnya diserahkan kepada Komisi Legislatif Khusus (KLK) untuk dipelajari dan disahkan. Menurut Lucia Mancini, staf sekretariat teknis Majelis Konstituante, rancangan tersebut mengatur mengenai anggaran yang dibutuhkan oleh Majelis, termasuk anggaran pengeluaran rutin seperti gaji anggota dan pengeluaran lainnya.

Mengenai gaji anggota Majelis, menurut Lucia Mancini, gaji tersebut akan dibayar pada setiap tanggal 15 selama Majelis melakukan pekerjaannya, karena mereka dilantik pada tanggal 15. Sedangkan sistem pembayaran gaji para anggota majelis akan dilakukan dengan mentransfer ke rekening masing-masing di dua bank yang telah ada, supaya mereka tidak antri berdesakan untuk menerima gaji.

Namun tidak tertutup kemungkinan kalau ada anggota yang mau mengambalnya secara tunai. "Kita melakukan hal ini karena para anggota majelis adalah orang-orang penting yang sudah semestinya dilayani dengan pelayanan khusus. Sistem seperti ini bukan hanya terjadi di Timor Lorosae, melainkan di semua negara. Jadi ini standar baku yang diterapkan oleh negara dalam membayar gaji para pejabatnya."

Untuk mempermudah proses pembayaran maka pada tahap awal pembukaan rekening bank untuk para anggota dilakukan di ruang sekretariat Majelis dengan mendatangkan dua orang pegawai bank untuk mendaftarkan identitas anggota majelis. Hal ini dilakukan karena anggota majelis tidak mempunyai waktu untuk melakukan pendaftaran pembukaan rekening bank masing-masing. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan administrasi yang dibutuhkan oleh bank akan disediakan oleh sekretariat teknis Ma-



Deputado Clementino dos Reis Amaral (kanan) bersama para jurnalis.

• • •

jelis namun para anggota Majelis tetap diminta untuk memberikan data pribadi dengan lengkap ditambah dengan kartu identitas anggota dan kartu tanda penduduk (*Cartao Registu*).

Sedangkan mengenai besarnya gaji yang akan diterima oleh setiap anggota majelis konstituante berkisar antara USD 400-USD 1.000, dengan klasifikasi ketua majelis berhak atas gaji USD 1.000 dua orang wakil ketua akan menerima gaji sebesar USD 800 dan anggota lainnya akan mendapat masing-masing USD 400. Mengenai besarnya anggaran operasional Majelis belum diketahui, karena rancangan usulan ang-

garan tersebut masih digodok di Dewan Menteri.

Walaupun demikian para anggota Majelis yang duduk dalam KLK mengaku, sampai sekarang mereka belum menerima satu usulan peraturan yang diajukan oleh Dewan Menteri untuk dibahas termasuk usulan anggaran operasional Majelis. Dalam perbincangan *Cidadaun* dengan beberapa anggota, mereka tidak mengeluh kalau dibayar dengan gaji sebesar itu, bahkan ada beberapa orang anggota yang mengatakan, tidak dibayarpun kami akan tetap bekerja. *Yang benar, ah.* •

Augusto Castro

Komisi-Komisi di Majelis Konstituante

Berdasarkan ketentuan tata-tertib yang telah disahkan, Majelis Konstituante mendirikan tiga komisi untuk mempermudah kerja para anggota.

• • •

Berikut adalah komisi-komisi yang telah dibentuk Majelis Konstituante.

Komisi Khusus Legislatif (KKL)

Komisi ini terdiri dari 35 anggota dengan komposisi 20 dari FRETILIN, tiga dari PD, dua orang dari PSD dan ASDT, dan satu orang masing-masing dari KOTA, UDC/PDC, PL, PNT, PPT, PST, PDC dan UDT. Pembentukan KKL ini untuk menjalankan fungsi legislatif yang diberikan Regulasi UNTAET No. 2/2001 pasal 2 (5).

Sesuai dengan namanya, Komisi ini bertugas mempelajari dan memutuskan rancangan regulasi yang disampaikan oleh Administrator Transisi. Komisi ini mempunyai kekuasaan penuh untuk memutuskan dan membatalkan setiap rancangan peraturan yang diusulkan, kecuali dalam masalah anggaran. Namun, dalam Komisi ini tidak semua fraksi yang ada di Majelis Konstituante mengambil bagian di dalamnya. Fraksi PD dan PSD menolak duduk dalam Komisi ini. Komisi ini melakukan sidang pada setiap hari Jumat yang di-

pimpin oleh Ketua Komisi Arlindo Marçal (PDC).

Komisi Sistematisasi dan Harmonisasi.

Komisi ini merupakan badan yang melakukan sistematisasi dan harmonisasi terhadap setiap pemikiran dan rancangan yang disampaikan individu anggota maupun partai atau fraksi untuk disatukan dalam sebuah dokumen umum yang kelak dapat dijadikan petunjuk dalam penulisan konstitusi.

Komisi ini beranggotakan 42 orang, dengan komposisi 24 dari FRETILIN, empat orang dari PD, tiga orang masing-masing dari PSD dan ASDT, dan satu dari partai yang lain. Penentuan jumlah anggota pada Komisi ini berdasarkan proporsi jumlah anggota dari setiap partai yang duduk di Majelis Konstituante. Komisi ini diketuai oleh Adérito de Jesus Soares (FRETILIN), juru bicara Manuel Tilman (KOTA) dan notulen Vicente Guterres (UDC/PDC). Komisi ini dibentuk berdasarkan pasal 25 Ketentuan Tata Tertib Majelis Konstituante.



Rapat pembentukan salah satu komisi Majelis Konstituante.

• • •

Komisi Tematis

Komisi ini dibentuk berdasarkan tema-tema prinsipil yang dibahas dan diatur dalam sebuah konstitusi negara. Di dalam Majelis Konstituante dibentuk empat komisi tematis, yakni Komisi I yang akan membahas beberapa hal prinsipil seperti hak, kewajiban dan kebebasan warganegara serta pertahanan dan keamanan nasional. Komisi I terdiri dari 21 orang yang diketuai oleh Paulo Assis (PD), sekretaris Adalgisa Soares Ximenes (FRETILIN), dan juru bicara Vicente Faria (FRETILIN). Komisi II akan membahas hal-hal menyangkut organisasi pemerintahan atau organisasi politik. Anggotanya 24 orang, dipimpin oleh Jacob Fernandes

(FRETILIN), sekretaris Feliciano Alves Fatima (ASDT), dan juru bicara Adérito de Jesus Soares (FRETILIN). Komisi III bertugas untuk membahas organisasi ekonomi, sosial dan keuangan. Komisi ini terdiri dari 22 orang anggota yang diketuai oleh Manuel Tilman (KOTA), Sekretaris Maria Solana (FRETILIN) dan bertindak sebagai juru bicara adalah Francisco Carlos Soares (FRETILIN).

Sedangkan Komisi IV diketuai oleh Francisco Xavier do Amaral (ASDT), dengan sekretaris Eusebio Guterres (PD) dan juru bicara Francisco Branco (FRETILIN). Komisi ini akan membahas prinsip dasar, jaminan, fiskalisasi, revisi konstitusi dan, disposisi akhir transisi. •

Augusto Castro